



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN TUNJANGAN  
PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS  
SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI GURU AGAMA  
(Studi Kasus Pada Seksi Pendidikan Agama Islam  
Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik**



Oleh:

**BILLY RAHMAWAN  
NPM : 21802091004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## ABSTRAKSI

**Rahmawan, Billy.** Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Berbasis Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (Studi Kasus Pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019). Program Magister Ilmu Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang; Komisi Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Pembimbing Kedua : Dr. Rulam Ahmadi, M.Pd

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Pendidikan Agama Islam sejak tahun anggaran 2008. Tunjangan Profesi Guru termasuk salah satu output prioritas Kemenag dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam dan mendukung program wajib belajar 12 tahun. Urgensi akan sebuah sistem manajemen data berbasis aplikasi digital sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru. Dengan menggunakan sebuah aplikasi, maka banyak data dan informasi terkait data kepegawaian guru khususnya Guru Agama Islam menjadi lebih mudah untuk ditata. Penggunaan sebuah aplikasi juga memudahkan admin dalam melakukan validasi data kelayakan pencairan Tunjangan Profesi Guru. Aplikasi berbasis digital secara daring (online) mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.

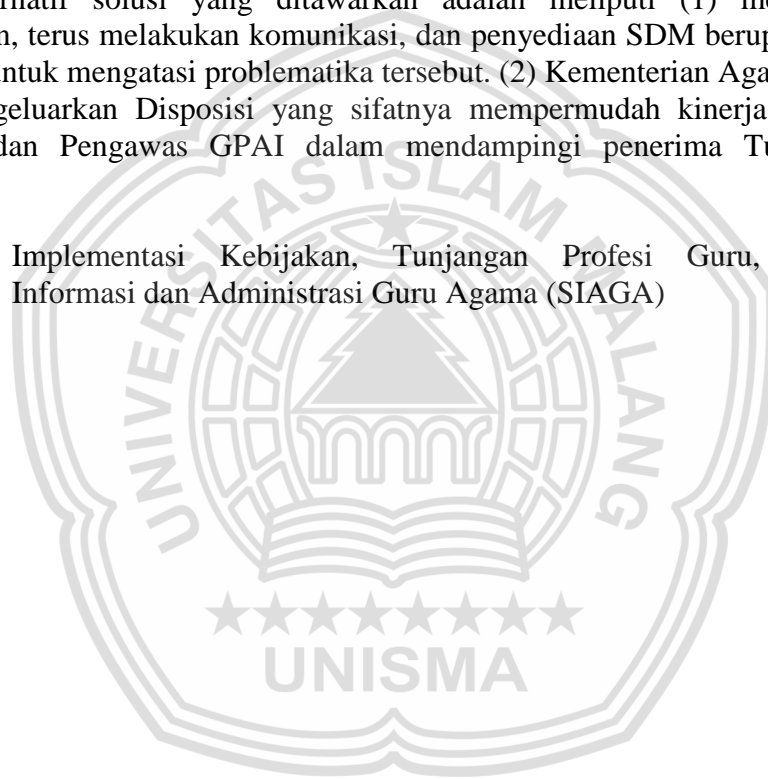
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka fokus permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan dari aspek pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?, (2) Apa saja problematika dari sisi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019? (3) Apa bentuk alternatif solusi terhadap permasalahan implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Malang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait subyek penelitiannya, peneliti langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala yang terjadi. Peneliti menggunakan prosedur *Snow Ball Sampling* yang menyerupai cara pembuatan bola salju, yaitu semakin lama menggelinding semakin besar. Dari jumlahnya sedikit menjadi lebih banyak. Kemudian dijelaskan bahwa responden yang akan dipilih selanjutnya, berdasarkan petunjuk responden sebelumnya. Prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut (1) Observasi atau pengamatan, (2) wawancara, dan (3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul diperiksa keabsahannya dengan pengecekan kredibilitas. Pelaksanaan pengecekan kredibilitas data menggunakan triangulasi, pengecekan, dan observasi. Setelah

diperiksa keabsahannya, data tersebut dianalisis dengan cara: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **Pertama**, Implementasi Aplikasi SIAGA Kantor Kementerian Agama Kota Malang dimulai dengan sosialisai, pelatihan, pedataan data guru, verval data, hingga penetapan kelayakan pencairan Tunjangan Profesi Guru di masing-masing guru dan pengawas pendidikan agama islam. **Kedua**, Faktor pendukung antara lain (1) Komunikasi dan koordinasi yang baik antar stakeholder dan sasaran kebijakan publik di kantor kementerian agama kabupaten/kota khususnya propinsi jawa timur; (2) sumberdaya pendukung dalam hal ini admin Seksi PAIS yang membantu berjalannya aplikasi SIAGA; dan (3) komitmen positif dari segenap perangkat untuk mengoptimalkan aplikasi SIAGA. Sedangkan faktor penghambat adalah : (1) Kelemahan Sistem Aplikasi SIAGA (2) lingkungan sosial yang tidak kondusif. **Ketiga**, Alternatif solusi yang ditawarkan adalah meliputi (1) melakukan pendampingan, terus melakukan komunikasi, dan penyediaan SDM berupa admin yang handal untuk mengatasi problematika tersebut. (2) Kementerian Agama Kota Malang mengeluarkan Disposisi yang sifatnya mempermudah kinerja Admin, Kordinator, dan Pengawas GPAI dalam mendampingi penerima Tunjangan Profesi Guru.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tunjangan Profesi Guru, Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA)



## ABSTRACT

**Rahmawan, Billy.** Implementation of the Policy for Distribution of Professional Allowances for Islamic Education Teachers Based on Information Systems and Administration for Religious Teachers (Case Study in the Section of Islamic Education at the Office of the Ministry of Religion of Malang City in 2019). Masters Program in Public Administration. Islamic University of Malang Postgraduate Program; Main Advisory Commission: Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Second Advisor: Dr. Rulam Ahmadi, M.Pd

The Ministry of Religion (Kemenag) has allocated a Professional Teacher Allowance for Islamic Religious Education Teachers since the 2008 budget. Teacher Professional Allowances are one of the Ministry's priority outputs in order to improve the quality of Islamic Religious Education and support the 12 year compulsory education program. The urgency of a digital application-based data management system is needed to overcome the challenges of filing the Teacher Professional Allowance. By using an application, a lot of data and information related to teacher employment data, especially Islamic Religion Teachers, will be easier to organize. The use of an application also makes it easier for admins to validate data on the feasibility of disbursing the Teacher Professional Allowance. Digital-based applications online (online) overcome the limitations of space and time.

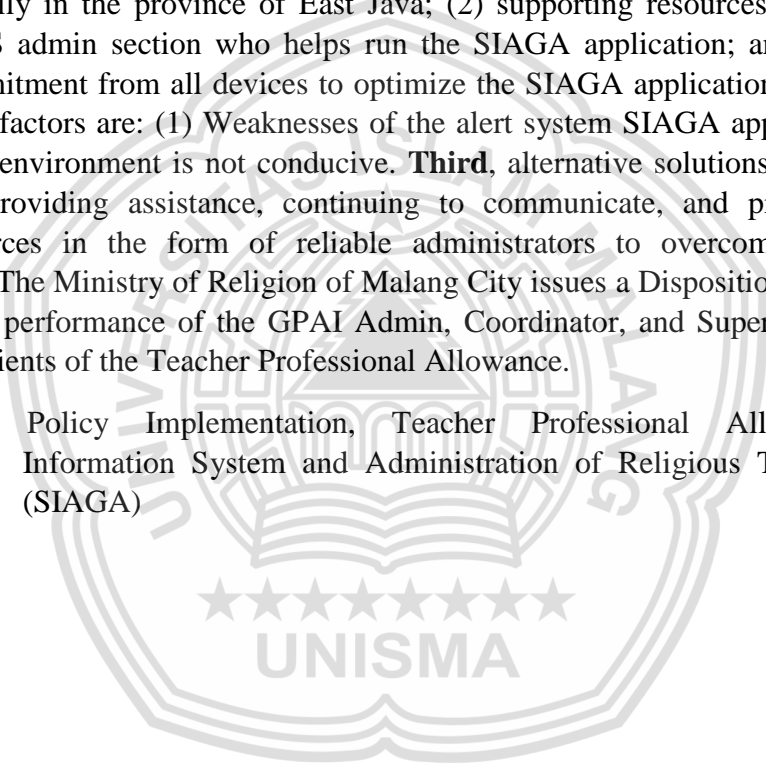
Based on the background of the above problems, the focus of this research problem can be formulated as follows: (1) How is the implementation of policies from the aspect of implementing the SIAGA-based Islamic Religious Education Teacher Professional Allowance in the Islamic Education Section of the Ministry of Religion Office of Malang City in 2019? (2) ) What are the problems in terms of supporting and inhibiting factors from the implementation of the SIAGA-based Islamic Religious Education teacher professional allowance distribution policy in the PAIS Section of the Malang City Ministry of Religion Office 2019? (3) What is the alternative form of solution to the problem of implementing the SIAGA-based Islamic religious education teacher professional allowance in the PAIS Section of the Ministry of Religious Affairs, Malang City in 2019?

This research was conducted at the Office of the Ministry of Religious Affairs in Malang City using a qualitative approach. This research uses field research which is carried out through direct observation related to the research subject, the researcher directly to the location which is the object of research which is oriented to the findings or symptoms that occur. Researchers used a Snow Ball Sampling procedure which resembles the method of making snowballs, namely the longer it rolls, the bigger it is. From a few to a lot more. Then it is explained that the respondent will be selected next, based on the previous respondent's instructions. Data collection procedures are as follows (1)

Observation, (2) interviews, and (3) documentation study. The validity of the collected data is checked by checking the credibility. The implementation of checking the credibility of the data uses triangulation, checking, and observation. After checking its validity, the data were analyzed by: (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) drawing conclusions.

The results of this study are as follows: **First**, the implementation of the SIAGA application for the Ministry of Religion Office of Malang City, starting with socialization, training, teacher data collection, data verification, to determining the feasibility of disbursing the Teacher Professional Allowance in each teacher and supervisor of Islamic religious education. **Second**, supporting factors include (1) good communication and coordination between stakeholders and public policy targets in the offices of the Ministry of Religion in regencies / cities, especially in the province of East Java; (2) supporting resources, in this case the PAIS admin section who helps run the SIAGA application; and (3) a positive commitment from all devices to optimize the SIAGA application. While the inhibiting factors are: (1) Weaknesses of the alert system SIAGA application (2) the social environment is not conducive. **Third**, alternative solutions offered include (1) providing assistance, continuing to communicate, and providing human resources in the form of reliable administrators to overcome these problems. (2) The Ministry of Religion of Malang City issues a Disposition which simplifies the performance of the GPAI Admin, Coordinator, and Supervisor in assisting recipients of the Teacher Professional Allowance.

Keywords : Policy Implementation, Teacher Professional Allowance, Information System and Administration of Religious Teachers (SIAGA)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan landasan suatu bangsa dan ukuran kemajuan suatu bangsa. Tidak dapat dipungkiri anggapan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan pendidikannya dan segala pranata penunjang pendidikan tersebut. Seperti disampaikan Muhardi bahwa Pendidikan sangat berpengaruh terhadap standar SDM dan kualitas hidup bangsa tersebut. Semakin tinggi pendidikan seorang warga negara, tentu akan mempunyai tingkat kualitas hidup yang lebih baik dibanding dengan warga negara yang berpendidikan hanya di jejang dasar <sup>1</sup>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan pendidikan di Indonesia. Dalam hal peningkatan SDM di Indonesia, Kemendikbud mengambil langkah untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau para guru, sebab guru adalah pranata utama dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia kedepan. Pada prinsipnya pendidikan terdiri atas tiga tahapan yakni, input, proses dan output dimana pada tahapan proses, guru adalah pelaksana pembentukan SDM Bangsa Indonesia yang unggul dan berkualitas. Kemudian barulah pranata lain

---

<sup>1</sup> Muhardi, *Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia* (Bandung ; Jurnal, 2004)

seperti sarana dan prasarana disiapkan untuk menunjang kinerja guru termasuk sebagian kebijakan dalam peningkatan keprofesian guru<sup>2</sup>

Pemerintah telah menyediakan beberapa kebijakan dalam meningkatkan keprofesian guru, mulai peningkatan kualifikasi pendidikan seorang guru, pelatihan dan pengembangan perangkat pembelajaran, hingga pemberian sertifikat pendidik profesional. Kebijakan pemerintah ini dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimana pasal 8 dan pasal 9 menyebutkan bahwa guru (pada jenis dan jenjang pada pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah) wajib memiliki kualifikasi akademik (minimal S1 (Sarjana) atau D-IV (Diploma IV) sesuai dengan bidang tugasnya), kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian kebijakan mengenai sertifikat pendidik sebagai bentuk apresiasi terhadap guru profesional dijabarkan dalam pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.<sup>3</sup>

Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tujuan dari tunjangan profesi ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru

---

<sup>2</sup> Saputra, *Hubungan Antara Kompetensi Profesionalisme Guru Dan Kinerja Guru Di Sma Xxx Tangerang*. (Jakarta : Jurnal 2011)

<sup>3</sup> UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

dalam menjalankan empat kompetensi yang dimilikinya. Untuk kompetensi, guru yang profesional harus memahami empat kompetensi pokok, yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Tunjangan pendidikan yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, baik melalui berbagai seminar, workshop maupun pengadaan perangkat pendukung pembelajaran. Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standar kompetensi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman<sup>4</sup>

Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang memiliki tugas melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi dibidang Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum. Seksi Pendidikan Agama Islam menaungi pembinaan mata pelajaran pendidikan agama islam pada lembaga naungan Dinas Pendidikan Kota Malang mulai dari Jenjang PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, bahkan pada Lembaga naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yakni Jenjang SMA/SMALB/SMK di wilayah Kota Malang. Tugas lain yang dimiliki adalah pengawalan kebijakan terhadap sertifikasi pendidik termasuk penyaluran tunjangan profesi Guru atau TPG bagi Guru Pendidikan Agama Islam Jenjang

---

<sup>4</sup> E, Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran. Kreatif dan Menyenangkan*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) hal 17



PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK di bawah binaan Kementerian Agama Kota Malang (sumber : Seksi PAIS Kota Malang 2019).

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan TPG bagi guru agama sejak tahun anggaran 2008. TPG termasuk salah satu output prioritas Kemenag dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama dan mendukung program wajib belajar 12 tahun <sup>5</sup>

Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikutnya setelah guru yang bersangkutan mendapatkan nomor registrasi guru dari departemen. Tunjangan profesi bagi guru diberikan kepada guru PNS dan bukan PNS (TPG Non PNS). Bagi guru PNS yang menduduki jabatan fungsional, TPG diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan. Sedangkan bagi guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru, sesuai Permendiknas Nomor 72 tahun 2008, diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru. Pada Kementerian Agama, Guru bukan PNS yang berhak menerima tunjangan profesi terdiri dari guru madrasah dan guru pendidikan agama pada sekolah. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi Guru bukan PNS dibebankan kepada DIPA Kanwil Kemenag Provinsi dan/atau DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. <sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dirjen Kemenkeu, *Kajian Tunjangan Profesi Guru* (Jakarta:Dirjen Menkeu 2015 ) hal 4.

<sup>6</sup> Dirjen Kemenkeu, *Kajian Tunjangan Profesi Guru* (Jakarta:Dirjen Menkeu 2015 ) hal 8.

Berdasarkan Data dari Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019 jumlah Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memiliki sertifikat pendidik berjumlah **315** dengan rincian guru yang berstatus PNS berjumlah **188** orang dan berstatus Non PNS berjumlah **127** orang. Dari jumlah 127 orang non PNS bersertifikasi, tersebut sebanyak 30 orang dari jalur insipasing dan 97 dari jalur reguler. Sedangkan untuk **292** Guru PAI belum memiliki sertifikat pendidik yang artinya belum berhak menerima tunjangan profesi guru<sup>7</sup>.

Dari jumlah guru yang begitu banyak pastinya dibutuhkan sebuah perangkat untuk memanajemen data. Manajemen data diperuntukan oleh admin yang menangani pemberkasan TPG. Selama ini manajemen data untuk pencairan TPG dilakukan secara manual dengan pemberkasan setiap bulan sekali. Tentu saja pemberkasan manual memiliki tantangan tersendiri, yakni penggunaan dokumen secara fisik yang rawan hilang dan sulit ketika akan dilakukan tracing atau pencarian data.

Urgensi akan sebuah sistem manajemen data berbasis aplikasi digital sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan pemberkasan TPG. Dengan menggunakan sebuah aplikasi, maka big data dan informasi terkait data kepegawaian guru khususnya Guru Agama Islam menjadi lebih mudah untuk ditata. Penggunaan sebuah aplikasi juga memudahkan admin dalam

---

<sup>7</sup> Data Kemenag Seksi PAIS Kota Malang tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2019

melakukan validasi data kelayakan pencairan TPG. Aplikasi berbasis digital secara daring (online) mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.

Penggunaan sistem manajemen aplikasi digital sangat menguntungkan dari sisi biaya operasional dan tenaga administrasi. Dengan adanya sistem manajemen aplikasi digital biaya operasional dapat ditekan. Selain itu penggunaan aplikasi digital, data lebih bersifat transparan sehingga meminimalkan adanya kecurangan atau manipulasi perubahan data.

Keuntungan penggunaan aplikasi manajemen data untuk peningkatan kinerja SDM di wilayah Kementerian Agama sesuai dengan pendapat Andreas Degenhardt) dalam bukunya “ *Application Management* “ yang menyatakan bahwa <sup>8</sup>:

*... application management thus creates the necessary financial leeway to drive forward IT innovation. Moreover, companies need to devote fewer resources to coordination and administrative tasks....*

Manajemen aplikasi yang efisien akan menciptakan efisiensi keuangan terhadap inovasi itu. perusahaan perlu mencurahkan lebih sedikit sumber daya untuk koordinasi dan tugas administrasi. Artinya dengan adanya aplikasi, biaya yang dikeluarkan untuk manajemen kinerja SDM bisa lebih murah. Tugas perusahaan hanya mengkoordinasikan penggunaan aplikasi tersebut.

Pentingnya menganalisis kebutuhan data dan informasi terkait penyaluran tunjangan profesi Guru PAI, Kementerian Agama Kota Malang juga menggunakan aplikasi. Aplikasi sistem manajemen data yang diberi nama SIAGA adalah singkatan dari Sistem Informasi dan Administrasi Guru

---

<sup>8</sup> Degenhardt, *Application Management. challenges -service creation – strategies* (Germany: Gabler, 2011) hal 9

Agama. SIAGA merupakan aplikasi yang wajib digunakan oleh setiap Guru Pendidikan Agama Islam di seluruh jenjang mulai Pra Sekolah hingga Sekolah Menengah untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data secara online.

Selain untuk Verval data, mekanisme penyaluran tunjangan Profesi Guru Agama dilaksanakan secara online dengan *By Name by Address* yang artinya setiap individu guru telah terdata dan terdaftar pada aplikasi SIAGA yang langsung masuk kerekening sendiri. Aplikasi SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama) adalah Sistem Pendataan Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang berbasis online. Untuk mendapatkan pembayaran TPG maka setiap individu guru harus dilengkapi persyaratan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) ditanda tangani Kepala Sekolah tempat tugas dan setiap semester genap wajib dilakukan sebelum tanggal 01 Juli. Sedangkan untuk semester ganjil wajib dilakukan sebelum tanggal 01 November.

Implementasi kebijakan publik terkait pencairan TPG menggunakan aplikasi juga harus memenuhi unsur implementasi kebijakan. Setidaknya terdapat 3 unsur implementasi kebijakan publik, yakni (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; dan (3) evaluasi. Dari segi Perencanaan, penggunaan aplikasi adalah kebijakan publik kementerian agama yang bertujuan memberikan kemudahan untuk validasi data pencairan TPG. Dari sisi pelaksanaan, penggunaan sebuah aplikasi harus dijalankan di seluruh kantor Kementerian Agama wilayah Indonesia. Kemudian unsur evaluasi, kebijakan penggunaan

aplikasi ini harus dimonitoring akan keberhasilan penggunaan aplikasi tersebut.

Lantas mengapa sebuah sistem informasi menjadi penting untuk dikaji yang dalam hal ini adalah aplikasi SIAGA. Sistem informasi manajemen bisa membantu atau paling tidak meringankan tugas manajemen dengan memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen. Informasi yang diberikan bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, baik keputusan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian atau tujuan yang lain<sup>9</sup>

Kemudian menjadi tidak kalah penting untuk menganalisis kebijakan publik penggunaan sebuah teknologi dari sisi kelebihan atau kekurangannya serta sisi pendukung dan penghambatnya. Mengingat setiap kebijakan pasti memiliki faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Sehingga implementasi penggunaan sistem aplikasi SIAGA juga menarik untuk di analisis.

Dengan Demikian sangat penting pemanfaatan sebuah aplikasi sistem manajemen, khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk itu, informasi perlu disusun dan disimpan secara sistematis agar mudah diketemukan kembali dengan cepat. Banyaknya data peserta dan tidak terkomputerisasinya proses pengolahan dan penilaian sertifikasi guru yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menyebabkan proses rekapitulasi membutuhkan waktu lama

---

<sup>9</sup> Sri Utami, *Peranan Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan Pengusaha Kecil*. (Surakarta: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi , 2011)

dan dapat memungkinkan adanya kesalahan entri data yang dimasukkan dengan data yang masuk ke dalam berkas usulan.

SIAGA melakukan verifikasi peserta sertifikasi guru dan kelayakan penerima tunjangan profesi guru dapat diberikan pelayanan secara benar, terpercaya dan selalu up to date. Data SIAGA diperbaharui secara berkala setiap semester. Hal ini bertujuan agar dapat memperoleh informasi-informasi terbaru sehingga mempermudah Kepala Seksi PAIS dalam mengontrol dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam. SIAGA diharapkan dapat dijadikan sebagai penyedia data dan informasi yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam.

Peneliti ingin mengkaji implementasi kebijakan penyaluran TPP di wilayah Kementerian Agama Kota Malang khususnya pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kota Malang. Sebagai data awal studi kasus penelitian ini terkait respon GPAI terhadap SIAGA adalah hasil wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan kepada Bu Diana (Opeator SIAGA) antara lain :

*“...kurangnya pengetahuan Informasi dan Teknologi (IT), kurangnya koordinasi antar Guru PAI dengan KKG PAI serta antar Guru PAI dengan rekan sebaya, kurangnya literasi...” (W/S2/003-005).<sup>10</sup>*

*“...GPAI dalam pengisian Data SIAGA tidak mau belajar sendiri, terlalu pasrah dengan operator (sekolah maupun KKG/MGMP)...” (W/S2/007-008)<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Narasumber, Bu Diana Operator SIAGA Seksi PAIS Kemenag Malang Tahun 2019

<sup>11</sup> Ibid

Implementasi kebijakan dari penyaluran TPG pastinya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan. Seperti yang disampaikan oleh George C. Edward III (dalam Mulyadi) <sup>12</sup> bahwa Implementation Problem Approach, harus mampu menjawab 2 pertanyaan utama, yakni (1) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, dan (2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor pendukung dari implementasi kebijakan penyaluran TPG adalah dalam analisis data yang dimiliki oleh Kementerian Agama Kota Malang berdasarkan SIAGA. Dengan manajemen sistem data yang dimiliki Kementerian Agama, penyaluran TPG akan lebih mudah. Penggunaan sistem manajemen yang signifikan juga akan memudahkan administrasi data guru khususnya guru agama.

Kemudian faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyaluran TPG menggunakan sistem manajemen informasinya adalah SDM Guru PAI. Beberapa SDM Guru PAI membutuhkan pelatihan khusus dalam penggunaan IT. Diperlukan waktu dan biaya yang cukup untuk melakukan pelatihan SDM tersebut. Inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam implementasi kebijakan.

Hal ini yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap penerapan Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) sebagai sarana pengambilan kebijakan penyaluran tunjangan profesi

---

<sup>12</sup> Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

guru pendidikan agama islam di lingkungan Kementerian Agama. Untuk lebih memfokuskan pada tema tersebut maka dalam penelitian ini diangkatlah judul **“Implementasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Berbasis Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (Studi Kasus Pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka fokus permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dari aspek pelaksanaan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?
2. Apa saja problematika dari sisi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?
3. Apa bentuk alternatif solusi terhadap permasalahan implementasi kebijakan penyaluran tunjangan profesi Guru Pendidikan Agama Islam berbasis SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis implementasi kebijakan dari aspek pelaksanaan penyaluran TPG PAI dengan aplikasi SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019.
2. Menganalisis problematika dari faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penyaluran TPG PAI dengan aplikasi SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019.
3. Mengarahkan alternatif solusi terhadap analisis problematika implementasi kebijakan penyaluran TPG PAI dengan aplikasi SIAGA pada Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kota Malang Tahun 2019.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti paparkan pada kajian penelitian ini, yakni secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas keilmuan, kontribusi bagi dunia pendidikan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada berbagai pihak yang bersinggungan secara langsung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Institusi yang diteliti: Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran Tunjangan Profesi Guru PAI di dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam peningkatan kualitas pengelolaan data berbasis teknologi informasi mengenai berbagai macam alternatif solusi yang ditawarkan untuk memecahkan problematika yang muncul ketika kebijakan ini bergulir.
- b. Bagi Pengembangan Ilmu: Diharapkan dari penelitian ini dijadikan sebagai pengetahuan baru tentang hal yang baru terutama di bidang Sistem Informasi penyaluran tunjangan profesi pada umumnya, di lingkungan Kantor Kementerian Agama.
- c. Bagi Peneliti dan mahasiswa: Untuk menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan terkait penyaluran tunjangan profesi Guru PAI di Kota Malang.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Studi Kasus Problematika Implementasi Kebijakan Publik Pencairan TPG Guru PAI Melalui Aplikasi SIAGA. Akhirnya penulis memberikan 3 Kesimpulan Penelitian, yaitu:

1. Implementasi Aplikasi SIAGA Kantor kementerian Agama Kota Malang dimulai dengan sosialisai, pelatihan, pedataan data guru, verval data, hingga penetapan kelayakan pencairan TPG di masing masing guru dan pengawas. Input aplikasi SIAGA diawali dengan : (1) Kantor Kemenag Kota Malang menerbitkan surat edaran terkait pencairan tunjangan profesi; (2) Membuat SOP langkah kerja penggunaan SIAGA; (3) Mengunduh Laporan Report Tunjangan Profesi Guru tahun berjalan; (4) Admin Seksi PAIS mengelola akun SIAGA untuk wilayah Kota Malang secara berkala; (5) Admin Seksi PAIS melakukan Verval data Nomor Registrasi Guru (NRG) untuk pengawas dan Guru; (6) Admin Subag melakukan Verifikasi dan Validasi (verval); 7) Admin melakukan feedback kepada Guru atau Pengawas Pendidikan Agama Islam yang status Vervalnya ditolak untuk melengkapi data administrasinya; dan (8) Tahap Akhir, admin SIAGA Seksi PAIS Kemenang Kota Malang melakukan pengecekan data pencarian TPG (ada perubahan atau tidak).

2. Kajian Problematika Implementasi Kebijakan Pencairan TPG PAI di Kota Malang menggunakan aplikasi SIAGA memiliki Faktor pendukung dan Faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain (1) Komunikasi dan kordinasi yang baik antar stakeholder dan sasaran kebijakan publik di kantor kementerian agama kabupaten/kota khususnya di wilayah Propinsi Jawa Timur; (2) sumberdaya pendukung dalam hal ini admin Seksi PAIS yang membantu berjalannya aplikasi SIAGA; dan (3) komitmen positif dari segenap perangkat untuk mengoptimalkan aplikasi SIAGA. Faktor pendukung ini seperti yang disampaikan oleh Bu Diana admin SIAGA Kemenag :

“ ketika ada kendala yang pertama adalah komunikasi dengan admin propinsi dan kab/kota yang lain sama-sama satu propinsi sehingga kita ada kendala apakah kita sama, jika sama maka kita tahu endingnya dari admin propinsi tersebut”.

Artinya Admin SIAGA Kemenag Kota Malang terus membangun komunikasi dengan Kemenag Provinsi ketika mengalami kebuntuan dengan memanfaatkan kemudahan sarana digital.

Sedangkan faktor penghambatnya, setidaknya terdapat 2 faktor utama, yakni (1) Kelemahan Sistem Aplikasi SIAGA sebagai sistem informasi manajemen (SIM) berbasis digital internet yang rawan akan virus, jaringan internet yang terganggu, serta adanya *Sistem Down* ketika dipakai sehingga mewajibkan adanya *Maintenance* secara berkala. Kemudian (2) lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menyebabkan sumber masalah implementasi kebijakan dimana sekelompok guru PAI yang tidak merespon

secara cepat informasi terkait pencairan TPG karena mendekati purna tugas serta ketidakmampuan dalam mengikuti perkembangan IPTEK. Faktor penghambat ini disampaikan oleh Bu Nur Sebagai Salah satu Pengawas PAI :

“.. Kami miliki guru 82 hanya 57 yang masuk siaga itu pun belum aktif mengajar bukan mengajar sebagai guru tapi belum aktif mengajar artinya bapak ibu guru PAI itu belum mengupload jadwal”.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Madekir:

“..Tetapi untuk SIAGA kendalanya ini memang salah satunya itu karena ini agak baru dan saya kurang begitu menguasai IT agak gratul gratul”.

Artinya bahwa masih banyak GPAI yang masih terlambat dalam mengakses informasi dan mengunggah data yang dibutuhkan karena rendahnya kemauan dan minimnya kemampuan guru tersebut dalam IT.

3. Faktor penghambat dikategorikan sebagai problematika Implementasi Kebijakan Publik penggunaan Aplikasi SIAGA dalam Pencarian TPG PAI di Kota Malang. Faktor Penghambat tersebut didominasi oleh rendahnya partisipasi guru terutama guru sepuh yang mendekati purna sehingga pencairan TPG terhambat. Permasalahan kedua adalah aplikasi berbasis Online beberapa kali mengalami *sistem down* atau *maintenance* perbaikan. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah meliputi (1) melakukan pendampingan, terus melakukan komunikasi, dan penyediaan SDM berupa admin yang handal untuk mengatasi problematika tersebut (2) Kementerian Agama Kota Malang mengeluarkan Disposisi yang sifatnya mempermudah kinerja admin, Kordinator, dan Pengawas GPAI dalam mendampingi penerima Tunjangan Profesi Guru. Alternatif Solusi yang ditawarkan oleh

Kementerian Agama Kota Malang disampaikan oleh Kasi PAIS Bapak Chandra Achmady :

“ Ya, kita harus menyediakan admin yang berkaitan aplikasi tersebut agar apa, ini bisa menjadi jujukkan kepada guru yang mengalami kesulitan terkait dengan aplikasi tersebut.”

Artinya salah satu solusi yang ditawarkan adalah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam bentuk koordinasi dengan admin SIAGA serta memberikan disposisi yang memudahkan proses pencairan TPG melalui penggunaan Aplikasi SIAGA.

## 6.2. Saran

Ada beberapa saran yang bisa penulis paparkan pada penelitian tentang Implementasi Kebijakan Publik Penggunaan SIAGA.

1. Untuk peneliti lanjutan yang akan menelaah lebih dalam implementasi kebijakan publik terkait pencairan TPG menggunakan Aplikasi, diharapkan mengkaji lebih dalam lagi.
2. Sistem Informasi ini dikelola oleh Seksi PAIS oleh karena itu di butuhkan SDM yang mampu dalam hal Sistem Informasi berbasis Online, oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan agar mampu menghasilkan SDM yang mampu dalam bidangnya.
3. Alangkah baik nya Sistem informasi di Seksi PAIS bisa Link satu sama lainnya satu data untuk mencakup keseluruhan.
4. Juga setelah mengetahui konsep dari sistem informasi pada Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) maka diharapkan kita dapat menerapkan sistem informasi tersebut dengan baik untuk menghasilkan data dan

informasi yang akurat agar dapat menghasilkan pengambilan keputusan sesuai dengan masalah yang ada dalam suatu organisasi publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU – BUKU :

- Abdul Wahab, Solichin.. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.. 2008
- Baedhowi, Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Semarang: Pelita Insani, 2009
- Bambang Prasetyo, Miftahul Jannah. Metode Penelitian Kuantitatif teori dan Aplikasi, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Degenhardt, Application Management. challenges -service creation – strategies (Germany: Gabler, 2011)
- Mulyadi, Deddy. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rosdakarya 2010
- Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. UGM Press. 2003
- Direktorat PAI. Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama serta Peraturan Menteri Agama Jakarta : Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2018.
- Dirjen Kemenkeu. Kajian Tunjangan Profesi Guru. Jakarta : Dirjen Menkeu 2015
- Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI. *Panduan Aplikasi SIAGA*. Jakarta : Kementerian Agama, 2019
- Edward III, George C. Implementing public Policy. USA: Congressional Quarterly Press. 1980
- Gunawan, Imam Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Hamalik, Oemar.. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. 2005
- Hartono, Bambang. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Jakarta: Rineka Cipta. 2013



- Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. 2001
- Kunandar. Guru Profesional . Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006
- Kementrian Agama. Juknis Aplikasi SIAGA Jakarta: Kemenang. 2018
- Kementrian Agama. Juknis Pencapaian TPG Madrasah. Jakarta: Kemenang. 2019
- Langer, Mc. IT and Organizational Learning. Managing Change through Technology and Education United Kingdom: Taylor & Francis Group. 2005
- Leod, Mc at al , Sistem Informasi Manajemen, edisi ke 10. Jakarta : Salemba Empat. 2009
- Lexy J, Meleong. metodologi penelitian kualitatif Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006
- LPMP Banten. Juknis Sertifikasi Guru Tahun 2016. Jakarta : LPMP Banten
- Marselus.R. Payong. Sertifikasi Profesi Guru. Konsep dasar Problematikanya, dan implementasinya Jakarta: PT Indeks. 2011
- Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pasolong, Harbani, Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, 2020
- Ristekdikti, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Jakarta:Dirjen Ristekdikti, 2017
- Rochaety, Eti dkk. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Jakarta : Bumi Aksara 2005
- Rusdiana, Moch Irfan. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Pustaka Setia. 2014
- Saputra, Uhar. Administrasi Pendidikan (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama. 2011
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Sutabri, Sistem Informasi Manajemen Jakarta : Andipublisher, 2005
- Tafiqurahman, Kebijakan Publik Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers. 2014.
- Tangkilisan.. The Policy-Making Process. Engleword Cliffs: Prentice Hall. 2003
- Widodo, Erna Dan Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Avirouz, Yogyakarta. 2000
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : MedPress. 2002

**PERATURAN :**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Dalam Binaan Kementerian Agama.
- Peaturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5377 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2016
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6871 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2018
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7180 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam
- Direktorat Pendidikan Agama Islam. Panduan Aplikasi SIAGA Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara.2019

**JURNAL DAN PENELITIAN TERDAHULU :**

- Aufa, Muhammad Muis. Sertifikasi Guru dan Permalahannya (studi Terhadap Guru di Madrasah ALiyah Pembangunan UIN Jakarta. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2015
- Azis, Fuadi. Pengambilan Kebijakan Berbasis *Education Management Infoemation System* (EMIS). Jurnal Pendidikan Islam, Volume III Nomor, 1 Juni 2014/1435 H. Yogyakarta : Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014

- Fadliani. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Berbasis Website Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *JURNAL EKLEKTIKA*, April 2015, Volume 3 Nomor 1
- Hariadi. Analisis Kebijakan Implementasi E Government terhadap Pelayanan Kependudukan dan Perekonomian di Kabupaten Sragen Surakarta: Tesis Universitas Negeri Surakarta, 2011
- Kurniasih, Dewi, dkk. Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 15 No.1 Maret 2013 hal 6 – 14. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.2013
- Kurniati, Umi. Efektivitas Manajemen Data Pokok Pendidikan Dalam Menyalurkan Dana Sertifikasi Guru Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. *Jurnal*. 2016
- Mubarak. Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2) 2020: 109-119.
- Mahdanisa Dinda dan Nurlim, Analisis Penerapan E-Government Dalam Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kab Kutai : Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kab. Kukar* Vol. 12 No. 1 Tahun 2018
- Muhardi, Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Bandung : Unisba Jurnal*. 2004
- Mukhtar, Konstruksi ke arah Penelitian Deskriptif. *Yogyakarta:Avyrouz*, 2001
- Mujamal, Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penilaian Dan Kinerja Guru Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Siswa Di SMP Ma’arif Nu 02 Paguyangan Kabupaten Brebes. *Purwokerto. IAIN Purwokerto*. 2015
- Susanto, Hendri Murti, dkk. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Malang : Jurnal Pendidikan Humaniora*. 2013
- Nuryatin, Dkk. *Jurnal Penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda Dan SPM)*. Malang : Universitas Brawijaya Malang. 2012
- Ridwan, Mochamad Hasan. Implementasi sistem informasi manajemen berbasis ICT dalam meningkatkan efektifitas kegiatan belajar mengajar dan administrasi di sekolah Islam . *Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim*. 2014

- Romlah Siti. Implementasi Sertifikasi Dalam Peningkatan Kinerja Guru Di Madrasah Ibtidaiyah Kota Metro. Lampung : Tesis IAIN Metro. 2018
- Rosadi, Dadi & Kuniasih Intan. Sistem Pemberkasan Sertifikasi Guru Berbasis Web. Bandung : Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2011
- Rosyidah, Umdatur. Evaluasi Usability Pada Aplikasi Simpatika Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 2018. SENSITEK 2018 STMIK Pontianak, 12 Juli 2018
- Tholkhah , Fery Aji. Pengambilan Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Dan Tunjangan Guru Berbasis Sistem Informasi Manajemen Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Purwokerto. IAIN Purwokerto. 2019
- Saputra, dkk. Hubungan Antara Kompetensi Profesionalisme Guru Dan Kinerja Guru Di Sma Xxx Tangerang. (Jakarta : Jurnal Universitas Esa Unggul, Jakarta 2011)
- Sri Utami, Setyaningsih. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan : Peranan Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan Pengusaha Kecil. Universitas Slamet Riyadi. 2011
- Susanti, Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Smk Pasar Minggu Jakarta. Jakarta: Jurnal STMIK Nusa Mandiri Jakarta 2016

#### WEBSITE

- Data SIAGA Kantor Kemenag Kota Malang Tahun 2019 Sumber <https://www.siagapendis.com/> . diakses pada 3 Maret 2020
- Google Drive. Seksi PAIS. [gg.gg/Problematika-Pencairan-TPG-2019-Melalui-SIAGA](https://drive.google.com/file/d/1GgGg/Problematika-Pencairan-TPG-2019-Melalui-SIAGA) diakses pada 20 Maret 2020
- <https://blog.gamatechno.com/5-kota-di-indonesia-yang-telah-menerapkan-e-government/> diakses pada jumat 6 Nopember 2020
- Kemenag Jateng. <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/aplikasi-siaga-mempermudah-informasi-guru-pai> . Diakses pada Selasa 7 April 2020
- Profil Kementerian Agama Kota Malang. 2018 Sumber: <http://KotaMalang.kemenag.go.id/> Diakses pada tanggal 3 maret 2020.
- Sejarah Lahirnya Kementerian Agama RI yang Sempat Tak Disetujui Sumber. [www.Tirto.id](http://www.Tirto.id) diakses pada 3 Maret 2020

